

## **KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN YANG DILAKUKAN PEMERINTAH PADA APBN TAHUN 2013**

**Oleh: H. Basuki Rachmat**

### *Abstract*

*The journal aims to see and describe the strategies undertaken by the government policy on poverty reduction in the state budget in 2013.*

*Factors and the problem of poverty in Indonesia is still a problem that is very haunting factor and a homework government and local governments are all parts of Indonesia. So the government needs to do a follow-up policy strategy of poverty alleviation programs and activities from year to year allocated funds in the state budget each year.*

*In 2013 the government launched a program of poverty alleviation through number 4 to 5%, this figure is an achievement that will be achieved and the government is very significant. Since the period of 1970 to 2007 period, the new poverty reduction achievements reached an average of 9 to 10% of the total population of Indonesia. Due to the fluctuation period, in which there is a reduction and an increase in poverty due to the economic crisis and the global financial crisis is lacking resulting impact on the Indonesian economy.*

**Keywords:** *Poverty Reduction Strategy Policy.*

### **PENDAHULUAN**

Gambaran kemiskinan di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang sampai saat ini masih menghantui bangsa Indonesia, Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat mendasar yaitu : Sumberdaya manusia Indonesia yang sebagian merupakan berpendidikan masih rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan yang dapat memberikan ruang pekerjaan bagi tamatan pendidikan dari Sekolah Lanjutan Atas, Perguruan Tinggi, arti tidak sebandingnya jumlah kesediaan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah lulusan pendidikan setiap tahunnya. Tidak meratanya pembangunan yang dilakukan di Indonesia, sehingga tidak meratanya pendapatan masyarakat.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Jumlah Penduduk miskin di Indonesia dapat dibagi kedalam beberapa kategori tahun atau periode sebagai berikut:

1. Periode 1976 – 2007, mengalami fluktuasi dimana tahun 1976 jumlah penduduk miskin berkisar 54, 2 juta jiwa ( sekitar 44,2 juta jiwa di pedesaan, dan sekitar 10 juta jiwa diperkotaan), hingga pada tahun 1980 berkurang menjadi sekitar 42,3 juta jiwa ( dimana 32, 8 juta jiwa diperkotaan, dan sekitar 9, 5 juta jiwa dipedesaan), berkurang sekitar 21,95 % dari tahun 1976. Di Tahun 1990 penduduk miskin di Inonesia berkurang menjadi 27, 2 juta jiwa ( sekitar 17,8 juta jiwa diprkotaan dan sekitar 9,4 juta jiwa dipedesaan), atau berkurang sekitar 35,69 % dari tahun 1980.
2. Pada priode tahun 1996 penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar 34, 5 juta jiwa ( sekitar 24,9 juta jiwa di perkotaan dan sekitar 9,6 juta jiwa di pedesaan) Bila dibandingkan pada tahun 1990 angka menurun sebesar 20,87 %. Namun pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi sekitar 38, 4 juta jiwa. Sementara pada 2007 jumlah penduduk miskin menurun hingga menjadi

berkisar 37,7 juta jiwa. Fluktuasi jumlah penduduk miskin di Indonesia disebabkan terjadinya krisis ekonomi, meningkatnya jumlah penduduk, adanya kebijakan pemerintah (Sumber: Badan Pusat Statistik tahun 2007)

### **Program Khusus Penanggulangan Kemiskinan**

Beberapa program pembangunan yang dilaksanakan dengan mekanisme pelaksanaan yang bertumpu pada masyarakat, yaitu bantuan disalurkan langsung kepada masyarakat. Dukungan juga dilakukan dengan pemberdayaan aparat dengan mengikut sertakan unsur-unsur lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan lainnya dan unsur perguruan tinggi.

Dalam kaitan ini dikembangkannya model pembangunan kelembagaan masyarakat yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang partisipatif.

Model Pembangunan Partisipatif telah dilaksanakan melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan dimantapkan dalam program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT). Selanjutnya program ini dilanjutkan dengan program pengembangan kecamatan (PPK) dan program pemberdayaan daerah mengatasi dampak krisis ekonomi (PDMDKE) yang dilanjutkan melalui jaringan Pengaman Sosial (JPS) serta Pemberdayaan Masyarakat.

Prinsip dari PPK adalah mengutamakan pembangunan yang dikelola langsung oleh masyarakat dalam wadah lembaga swadaya masyarakat desa yang dikoordinasikan dalam musyawarah di Tingkat kecamatan (Gunawan, 1999)

Program-program pemerintah yang telah dilaksanakan pada saat pemerintahan Orde Baru tahun 1994 – 1995 yaitu:

- a. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dasar adalah Inpres Desa tertinggal Nomor 5 Tahun 1994.
- b. Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)
- c. Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
- d. Program Pengembangan Desa-kota terpadu.
- e. Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE).

### **IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**

- 1) Strategi apa saja yang akan dilakukan pemerintah untuk melanjutkan pengentasan kemiskinan pada APBN tahun anggaran 2013.
- 2) Apakah strategi yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2013 merupakan program lanjutan tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Berapa besar dana yang dialokasikan untuk melakukan program lanjutan pengentasan kemiskinan pada APBN tahun 2013.
- 4) Apakah kebijakan yang ditempuh pemerintah pada APBN tahun 2013, tentang pengentasan kemiskinan, tepat sasaran.
- 5) Bagaimana implementasinya dilapangan pada saat pelaksanaannya.

### **RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang permasalahan yang ada, serta untuk lebih fokus dan terarah, kajian literatur ini, akan membatasi pada permasalahan-permasalahan:

- 1) Strategi apa saja yang akan dilakukan pemerintah pada APBN tahun anggaran 2013.
- 2) Berapa besar dana yang dibutuhkan untuk melakukan program lanjutan pengentasan kemiskinan pada APBN tahun 2013.
- 3) Apakah kebijakan yang ditempuh pemerintah pada APBN tahun 2013, tentang pengentasan kemiskinan tepat sasaran.

#### **Tujuan Penelitian adalah:**

Untuk mengetahui program dan kegiatan apa-apa saja yang akan dilaksanakan pada APBN tahun 2013 untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

#### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti baik secara teoritis maupun praktis, bagi penulis didalam berkarier di dunia akademik.

#### **Manfaat Teoritis**

Harapan penulis hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pada khususnya ilmu Ekonomi makro dan mikro ekonomi dan serta Manajemen Keuangan Daerah.

#### **Manfaat Praktis**

- a) Memberikan gambaran apakah program dan kegiatan pengentasan kemiskinan pada APBN tahun 2013, sudah tepat sasaran.
- b) Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memluas pengetahuan dan wawasan keilmuan, sehingga peneliti sebagai tenaga pengajar fungsional dapat mengambil dan melihat sejauh mana perencanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terealisasi tepat sasaran. Apalagi permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendasar dan harus diselesaikan dengan cara sistematis dan berkelanjutan, sehingga angka kemiskinan dari tahun ke tahun semakin dapat diperkecil bahkan dapat dihapuskan dalam program dan kegiatan pada APBN tahun-tahun berikutnya. Dan ini merupakan bahan ajar yang sangat baik untuk materi ekonomi mikro dan makro serta manajemen pengelolaan keuangan negara secara makro.
- c) Untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)  
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi Bidang Kajian Ilmu Ekonomi makro Manajemen Keuangan Negara dan Daerah.

#### **Desain Penelitian**

Metode penelitian ini penulis menggunakan metode library riset serta internet. Dimana data yang ditulis diambil dari beberapa buku-buku ilmiah karangan para pakar, para peneliti dan majalah-majalah ilmiah serta beberapa pustaka yang penulis dapatkan dari beberapa ahli dibidang pengentasan kemiskinan.

Sedangkan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dimana menurut Arikunto (2010:3) yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang ada dan sudah disebutkan dimana hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan hasil penelitian”

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang

diselidiki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif. Hal ini dikarenakan permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Menurut Sugiyono (2011:245) “ Analisis data kualitatif adalah bersifat Induktif “ Analisis yang digunakan pada penelitian ini berlandaskan pada pengetahuan khusus, dimana fakta-fakta yang unik, dan merangkaikan fakta-fakta khusus itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum. Konklusi peneliti yang ditarik dari cara berpikir semacam ini ditempuh dengan jalan induktif.

### **Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah Program pengentasan kemiskinan yang di lakukan Pemerintah pada APBN tahun 2013.

### **Sumber Data**

Sumber data merupakan data yang diperoleh dan digunakan untuk peneliti jadikan bukti dan untuk dibuktikan secara akuntabel dapat dipertanggung jawabkan dan menurut “ Arikunto (2012:172) Sumber data dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Data Person, yaitu data yang diperoleh dari orang atau person, berupa jawaban atau tulisan dengan menggunakan angket/kuisisioner. Maupun wawancara dab jawaban tertulis.
2. Paper, yaitu data berupa simbol yang menyajikan tanda tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol lain. Pengertian paper tidak hanya sebatas kertas sesuai dengan terjemahannya dari Bahasa Inggris, tetapi semua media yang cocok untuk menggunakan metode dokumentasi yang berupa data-data dari media cetak, dan media elektronik. Majalah dan surat-surat kabar.
3. Data primer, data yang diperoleh secara langsung melalui Wawancara dari nara sumber.
4. Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan berisi informasi yang berkaitan dengan data yang diperoleh.

### **Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian**

Menurut Arikunto (2010:265)” Tehnik pengumpulan data atau metode observasi adalah suatu usaha pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar “ Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah berupa: Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan dan sumber referensi lain untuk menunjang permasalahan yang diteliti serta yang memiliki hubungan dengan judul penelitian.

**Pada pelaksanaannya peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data dengan:**

#### **Dokumentasi atau pengukuran langsung**

Pendekatan metode ini adalah, dilakukan penyelidikan pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah, yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Kabupaten /kota.

Data diambil dari pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tahun 2013 di Depan Sidang Paripurna DPR, pada saat pembacaan Nota Keuangan 2014 dihadapan anggota DPR dan Para Duta Besar dan Menteri Pimpinan dan Pimpinan Lembaga seluruh pejabat eselon I dari Kementerian dan lembaga.

### **Landasan teori terkait dengan konsep dan definisi Kemiskinan.**

#### **Landasan Teoritis terkait Kemiskinan.**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia karanga WJS Poerwadarminta tahun 2001, kemiskinan diartikan sebagai keadaan tidak berharta benda, serba kurang. Sementara pada *The Concise Oxford Dictionary* mendefinisikan kata "poor" sebagai "*lacking adequate money or means to live comfortably*". Dengan pengertian tersebut, harta benda didefinisikan lebih luas lagi tidak sekedar uang semata.

Menurut Ermaya Sunadinata (1997: 146) Strategi adalah suatu upaya yang dilakukan secara rasional dengan memperhitungkan aspek terkait untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran.

Hendra Asmara (1986) mengukur dari ketimpangan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku, maka kemiskinan dapat dibagi:

- 1) Miskin absolute yaitu apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan;
- 2) Miskin relative yaitu seseorang sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya;
- 3) Miskin cultural yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu.

#### **Menurut Biro Pusat Statistik(BPS)**

Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan absolute merupakan ukuran yang didasari pada kebutuhan akan kalori per hari yang menurut BPS besarnya sebesar 2100 kalori/hari serta pengeluaran non makan lainnya. Kebutuhan pokok selain makanan adalah perumahan ( bahan bakar, air bersih, dan penerangan ), pakaian dan beberapa bahan tahan lama serta berbagai jasa terutama pendidikan dan kesehatan . Untuk pengeluaran jenis pangan BPS tidak hanya mengambil beras sebagai patokan, tetapi berdasarkan keinginan pemerintah yaitu dengan pola keragaman pangan yang dapat diperoleh. Dengan nilai uang dari jumlah kalori tersebut dihitung berdasarkan perbandingan atau rasio antara konsumsi total rumah tangga, sehingga selanjutnya diperoleh konsumsi total minimum yang dianggap sebagai garis kemiskinan. Contoh ini diambil tahun 1996 batas kemiskinan dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terbagi atas:

- 1) Tingkat ketimpangan tinggi (high inequality) apabila 40 % dari penduduk berpenghasilan rendah menerima kurang dari 12 persen dari seluruh pendapatan nasional.
- 2) Tingkat ketimpangan sedang ( moderate inequality) apabila 40 % dari penduduk berpenghasilan rendah menerima antara 12-17 % pendapatan nasional.
- 3) Tingkat ketimpangan sedang ( moderate inequality ) apabila 40 % penduduk berpenghasilan rendah menerima antara 17 % pendapatan nasional.
- 4) BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak

untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat.

Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.

Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan.

Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan.

- 5) Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); (9) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Indikator-indikator tersebut dipertegas dengan rumusan yang konkrit yang dibuat oleh BAPPENAS yaitu ; terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya

mengonsumsi 1.571 kalori per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kalori per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan terendah. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa indikator utama kemiskinan adalah; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (9) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (10) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (11) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (12) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (13) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (14) terbatasnya akses terhadap air bersih; (15) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (16) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (17) lemahnya jaminan rasa aman; (18) lemahnya partisipasi; (19) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (20) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

6. Sementara itu jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan terdiri dari: (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan struktural (Sumodiningrat, 1998).

### **Kriteria Kemiskinan**

Berdasarkan hasil penelitian World Bank dalam Jusman (1999: 25) rumah tangga miskin pada umumnya adalah rumah tangga yang:

- (a) Mempunyai anggota rumah tangga banyak,
- (b) Tingkat pendidikan kepala rumah tangga maupun anggotanya rendah,
- (c) Sering berubah pekerjaan.
- (d) Sebagian besar mereka yang telah bekerja masih mau menerima tambahan pekerjaan lagi bila ditawarkan.
- (e) Sebagian besar sumber pendapatan utamanya adalah dari sektor pertanian. Di daerah pedesaan rumah tangga yang anggotanya bekerja di sekitar pertanian adalah mereka yang menguasai tanah sangat marginal (tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga).
- (f) Kondisi tempat tinggal masih memprihatinkan terutama dalam hal penyediaan air bersih dan listrik untuk penerangan.

Tahun 1982, Prof. DR. Emil Salim, dalam Jusman (1999:27) mengemukakan lima ciri mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, yaitu:

- 1) Umumnya mereka tidak memiliki faktor produksi seperti: tanah, modal, ataupun keterampilan yang cukup, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.
- 2) Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri.

- 3) Tingkat pendidikannya rendah, tidak sampai tamat Sekolah Dasar, waktu mereka tersita habis untuk mencari nafkah dan mendapatkan tambahan penghasilan.
- 4) Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan, tidak memiliki tanah dan walaupun ada sangat kecil. a Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar diluar sektor pertanian. Kesenambuangan kerja kurang terjamin karena mereka bekerja sebagai buruh musiman dengan upah yang sangat rendah. Tidak sedikit jumlah mereka yang menjadi pekerja bebas dalam usaha apa saja (sektor informal).
- 5) Mereka yang hidup di daerah kota masih berusia muda dan tidak didukung dengan keterampilan yang memadai.

### **Penyebab Kemiskinan**

Tjahya Supriatna (1997: 20) menyatakan bahwa kondisi penduduk miskin disebabkan oleh :

- 1) Faktor penduduk yang terpupuk ke dalam lembah kemiskinan akibat dampak ketidak meretaan hasil pembangunan.
- 2) Sikap mental penduduk yang mengalami kemiskinan secara alamiah maupun kultural.

Kemiskinan alamiah ini ditunjukkan oleh situasi lingkaran ketidak berdayaan mereka yang bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan dan gizi, produktivitas, penguasaan modal, keterampilan dan teknologi serta hambatan infrastruktur maupu etnis sosial lainnya. Selanjutnya faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan menurut Harry Hikmat dalam Muhamad Hafar Hafsah (2008 : 32) dapat dikategorikan dalam dua hal sebagai berikut:

#### 1. Faktor internal

Faktor-faktor internal (dari dalam individu atau keluarga fakir miskin) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain berupa kekurangan kemampuan dalam hal :

- a. Fisik (misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan)  
Intelektual (misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kurang tahunya informasi)
- b. Mental emosional (misalnya malas, mudah menyerah, putus asa, tempramental)  
Spiritual (misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin)
- c. Sosial psikologis (misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi/stres, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan)
- d. Keterampilan (misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja) Asset (misalnya tidak memiliki stock kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan, dan modal kerja)

#### 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal (berada diluar individu atau keluarga yang menyebabkan terjadinya kemiskinan) antara lain:

- a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar
- b. Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah
- c. Terbatasnya lapang pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal
- d. Kebijakan perbankan terhadap pelayanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro

- e. Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor reel masyarakat banyak
- f. Sistem mobilitas dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal.
- g. Dampak sosial negatif dan program penyesuaian struktural (*Structural Adjustment Program/ SAP*)
- h. Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana
- i. Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material
- j. Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata
- k. Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin Selanjutnya menurut Harry Hikmat dalam Mohamad Jafar Hafsa (1998 : 33 : 34) Faktor internal dan eksternal tersebut mengakibatkan kondisi fakir miskin tidak mampu dalam hal:
  - a. Memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, air bersih, kesehatan dasar, dan pendidikan dasar
  - b. Menampilkan peranan sosial, seperti tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai pencari nafkah sebagai orang tua, dan sebagai warga masyarakat dalam suatu lingkungan komunitas
  - c. Mengatasi masalah-masalah sosial psikologis yang dihadapinya seperti konflik kepribadian, stres, kurang percaya diri, masalah keluarga, dan keterasingan dari lingkungan
  - d. Mengembangkan potensi diri dan lingkungan, seperti keterampilan wira usaha, keberanian memulai bisnis membangun jaringan, akses informasi, dan lain sebagainya
  - e. Mengembangkan faktor produksi sendiri, seperti kepemilikan tanah yang terbatas, tidak ada sarana prasarana produksi, dan hal sebagainya.

## 2. Bahasan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan sebagian warga masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi : Pangan, sandang dan papan, serta pendidikan, kesehatan. Kemiskinan diakibatkan sulitnya mendapatkan akses untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan sehingga untuk itu diperlukan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai yang bertanggungjawab untuk dapat membantu dan menjembatani serta mencarikan solusi yang terbaik untuk dapat lepas dari belenggu kemiskinan yang dirasakan atau dialami sebagian besar warga masyarakat kita. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan publik sudah selayaknya dapat memberikan solusi dan membantu mengatasi kesulitan warga masyarakatnya terutama warga masyarakat yang tergolong warga masyarakat miskin.

Pemerintah pada Kabinet Indonesia bersatu jilid II, tahun anggaran 2013 telah merencanakan beberapa strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia untuk tahun anggaran 2013 dalam dokumen Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013. Adapun strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah merupakan program dan kegiatan lanjutan pada APBN tahun 2011 dan tahun anggaran 2012. Hal ini dapat dilihat jelas pada program dan kegiatan yang tercantum dalam APBN tahun 2013.

Untuk tahun 2013 pemerintah mencanangkan “ MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA “ (MP3 KI) Program ini merupakan program percepatan dan perluasan pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga angka kemiskinan dapat terwujud antara lain dengan:

- (1) Tujuan Akselerasi Pengurangan Kemiskinan;
- (2) Sasaran: Pengurangan angka kemiskinan 3-4 %, sampai dengan RPJP tahun 2025, dimana sasarannya adalah kelompok sasaran keluarga sangat miskin yang berjumlah 16,6 5 atau sejumlah 37, 2 juta pada tahun 2004, menjadi 11, 37 % atau 28,07 juta orang pada tahun 2013. Khususnya pada kelompok pertanian dan perikanan di daerah.

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan melalui Integrasi / sinergi program kemiskinan sesuai kondisi wilayah dengan melibatkan pemerintah, BUMN, Swasta, dan Masyarakat. Strategi yang dijalankan adalah dengan melakukan perbaikan system jaminan sosial dan peningkatan tarap hidup yang berada pada garis kemiskinan.

Sumber diperoleh dari: Pidato Presiden tentang RAPBN 2014, Beserta Nota Keuangannya. Dihadapan Sidang Paripurna tgl. 16 Agustus 2013. Dan disebarluaskan melalui media cetak “ BERTINDAK UNTUK RAKYAT DEMI MENINGKATAN KESEJAHTERAAN” edisi 228 ( 26-31 Agustus 2013).

Strategi program-program yang dicanangkan pemerintah dalam APBN tahun 2013 dengan membagi kedalam klaster-klaster program dan kegiatan, yang pendanaannya telah dialokasikan dalam APBN tahun anggaran tahun 2013. Dimana program inti adalah:

1. Bantuan dan Perlindungan Sosial ( Klaster 1) dengan rincian sasaran program dan kegiatan:
  - Bantuan Operasional Sekolah(BOS); b. Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Raskin; c.Keluarga Harapan (PKH) untuk bantuan yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) sebanyak 2,4 juta RTSM. d. Jaminan Kesehatan Masyarakat( JamKesmas). E.Bantuan social untuk pengungsi korban bencana alam. F.Bantuan untuk pecandang cacat. F. Bantuan untuk Lansia.

Pada klaster ini ( klaster I) pemerintah mengibaratkan sebagai ikan, melalui program sebagai berikut:

- a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), anggaran BOS tahun 2013 adalah sebesar 27,48 triliun. Adapun untuk persiswa mendapat SD mendapat Rp.580. ribu. Pertahun dan siswa SMP Rp.710 ribu pertahun.
- b. Beras/Subsidi atau beras untuk rumah tangga miskin (raskin) 15/kg/bulan dengan harga 1.600.-/kg.
- c. Program keluarga harapan (PKH) yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) setiap RTSM sebesar Rp.800.000,- atau Rp.2.8 juta pertahun. Anggaran untuk program tahun 2013 adalah sebesar Rp.3,6 triliun untuk menjangkau 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).
- d. JAMINAN kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat gratis di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah kelas III milik pemerintah, Anggaran untuk ini disediakan sebesar Rp. 8,2 triliun untuk menjangkau 86,4 juta jiwa . Selain itu Jamkesmas diberikan bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Rp.100. juta/Puskesmas/tahun.
  1. Bantuan Sosial untuk pengungsi korban bencana alam dan social.

2. Bantuan untuk penyandang cacat Rp.300 rb per bulan.
3. Bantuan untuk lanjut Usia (Lansia) terlantar Rp.200. Ribu/per bulan.

2. Sedangkan program dan kegiatan kedua( Klaster II) , “ Pemberdayaan Masyarakat “ Dengan rincian program dan kegiatan serta sasaramya adalah:

### **PNPM Mandiri**

Program ini merupakan program lanjutan yang dilakukan pemerintah dan dilaksanakan oleh beberapa Kementerian dan lembaga Negara antara lain :

- a. Kementerian Dalam Negeri;
- b. Kementerian Pekerjaan Umum (PU);
- c. Kementerian Penanganan Daerah Tertinggal (PDT);
- d. Kementerian Pertanian;
- e. Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif.

Program PNPM mandiri dirasakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sangat –sangat membantu untuk melakukan beberapa pembangunan antara lain pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana bangunan –bangunan yang dibutuhkan didesa-desa dan sebagian kota-kota untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan. Serta pembangunan ekonomi kreatif bagi warga masyarakat miskin, pemberian modal secara bergulir untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat didea dan dikota-kota yang masih membutuhkan. Sasaran program PNPM mandiri tahun anggaran2013 adalah akan mencapai sasaran 6.752 kecamatan di 495 Kabupaten/Kota di 33 Propinsi. Dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar 9, 7 Triliun rupiah. Secara terinci dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **PADA TAHAP II ( KLAS TER II) Pemberdayaan Masyarakat. (PNPM Mandiri )**

Klaster II diibaratkan sebagai kail, melalui program ini pemerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM) Mandiri.

- A. Program ini dilaksanakan oleh 5 Kementerian meliputi : Kemendagri, PU, PDT, Pertaniandan dan Parawisata & Ekonomi Kreatif.
- B. Anggaran PNPM 2013 sebesar Rp.9,7 triliun.
- C. Setiap kecamatan memperoleh dana hingga Rp.3 Milyar rupiah.
- D. Untuk 2013 sasaran yang akan dicapai 6.752 kecamatan , 495 kabupaten kota 33 provinsi.

3. Program dan kegiatan ke.3 (klaster III) Pemerintah akan memberikan bantuan kredit usaha kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mendapatkan kredit usaha Rakyat (KUR). Dana akan disalurkan kepada 33 Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan kredit ini, adapau bank-bank yang ditunjuk meliputi : Namk BRI, BNI, Mandiri, Bank-Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, BNI Syariah serta 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Dengan Penjamin untuk pemberian kredit KUR ini adalah PT. Asuransi Kredit Indonesia (PT.ASKRINDO). Dana yang dikucurkan sebesar Rp. 36 triliun, dimana setiap warga masyarakat yang berusaha diberikan sebesar Rp. 20.000.000. per orang. Pinjaman ini diberikan tanpa dimintakan jaminan agunan. Pengajuan hanya melampiri KTP, KK, Keterangan Usaha yang diketahui Kepala Desa dan Kelurahan. Untuk KUR pada TKI dengan kredit sesuai kebutuhan Negara tujuan. KUR diberikan untuk perkebunan dan diberi jangka waktu 13 tahun.

### PADA TAHAP III ( KLASSTER III) Kredit Usaha Rakyat. (KUR)

Klaster ini diibaratkan sebagai perahu. Melalui program ini Usaha Rakyat (KUR) dari 33 bank, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah serta 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan secara terinci diuraikan sebagai berikut:

- A. Pemerintah memberikan jaminan melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia ( Askrindo ) sebesar Rp. 2 triliun/tahun. KUR tahun 2010 dikucurkan sebesar Rp. 17,23 triliun, KUR tahun 2011 sebesar Rp.29 Triliun, KUR tahun 2012 sebesar Rp.34,23 triliun dan KUR tahun 2013 sebesar Rp.36 Triliun.
- B. KUR tahun 2012 telah disalurkan Rp.34, 23 triliun dan tahun 2013 dialokasikan 36 triliun. KUR sebesar 20 Jt diberikan tanpa agunan.

Persyaratan tetap yang harus dipenuhi:

Memiliki Usaha tetap, KTP, KK dan Keterangan Usaha Dari Desa/kelurahan.

KUR untuk TKI dengan kredit sesuai dengan kebutuhan ke Negara tujuan KUR untuk perkebunan diberikan waktu hingga 13 tahun.

4. **Untuk program ke 4 (klaster IV)** . Pemerintah akan melakukan Program ProRakyat dimana meliputi:
  - a. Program rumah swadaya tahun 2013 akan dibangun sebanyak 230.000 unit rumah di 268 kabupaten/kota.
  - b. Program Kendaraan umum Angkutan Murah;
  - c. Program Penyediaan Air Minum berbasis Masyarakat;
  - d. Program listrik Murah dan Hemat, Peningkatan Kehidupan Nelayan;
  - e. Program Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan di 5(lima) kota antara lain : DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar.

PADA TAHAP IV. ( KLASSTER IV) Program Pro Rakyat, secara terinci diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Rumah Swadaya tahun 2013 dialokasikan 2, 29 triliun untuk membangun sebanyak 230.000 unit rumah di 268 kabupaten/kota. Tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp.1,6 triliun, telah dibangun 248.134 unit rumah terdiri dari pembangunan baru sebanyak 18.134 unit dan peningkatan kualitas sebanyak 230.000 unit rumah yang tersebar di 224 kabupaten/kota.
- b. Program Kendaraan Umum Angkutan Murah pada tahun 2013 dengan anggaran Rp.2,07 triliun.
- c. Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat ( Pamsimas) tahun 2013 di anggaran Rp.5,576 triliun meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp. 2, 146 triliun.
- d. Program listrik Murah dan Hemat tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp.200 milyar.
- e. Program kehidupan Nelayan tahun 2013 dianggarkan 901 Milyar.
- f. Program peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan tahun 2013 dianggarkan sebesar 133, 2 milyar, Pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 74,77 milyar di 5 kota yakni DKI, Jakarta Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar.

(Sumber: Media Cetak Majalah “ Bertindak untuk Rakyat Demi Meningkatkan kesejahteraan “ Edisi 228 (26-31 Agustus 2013.

## **SIMPULAN**

Dari berbagai program dan kegiatan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah dengan sungguh-sungguh ingin menyelesaikan pengurangan masyarakat miskin di Indonesia tinggal 4 sampai 5 % sampai pada RPJP tahun 2004- 2025. Angka capaian ini berdasarkan Begitu besarnya pemerintah mengalokasikan dana pengentasan kemiskinan, sehingga perlu dilakukan pengawalan yang ekstra ketat dari seluruh komponen bangsa, terutama bagi aparatur pengawasan internal dan eksternal. Serta dibutuhkan keseriusan oleh seluruh jajaran aparatur kementerian/lembaga Negara yang diberikan tugas tanggungjawab untuk melaksanakan dari jajaran aparatur tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta aparatur dikementerian/lembaga Negara yang ditunjuk sebagai kordinator pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Keseriusan ini sangat perlu agar sasaran dan ketepatan sasaran serta tujuan yang akan dicapai sesuai apa yang diinginkan oleh pemerintah dapat terwujud untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Strategi Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah teralokasi pendanaannya pada APBN tahun anggaran 2013.

Jika strategi program dan kegiatan ini dapat berjalan dengan sangat baik, maka tidak dipungkiri bahwa masyarakat miskin di Indonesia terutama di Desa dan sebagian kota-kota di Indonesia akan berkurang, berarti pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta pemerataan pendapatan akan semakin adil dan merata, namun untuk mencapai kata adil dan merata yang hakiki memang sangat sulit, tetapi setidaknya-tidaknya warga masyarakat miskin yang saat ini masih berkisar dengan jumlah hampir 11,37 %, dapat dikurangi setiap tahunnya. Namun demikian pemerintah perlu juga untuk menekan angka kelahiran dengan terus mensosialisasikan program-program keluarga sejahtera, seperti keluarga berencana, dimana Indonesia pernah berhasil melaksanakan program ini pada era pemerintahan orde baru.

Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang teralokasi dananya pada APBN tahun 2013 merupakan program dan kegiatan lanjutan, dengan dipertajam dan ditambahkan dengan beberapa program dan kegiatan pro rakyat yang sangat strtaegis serta untuk mempercepat pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Indonesia,

## **SARAN**

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi yang lebih detail atas beberapa program pro rakyat yang telah digulirkan dan berjalan saat ini, misalnya BLSM, Bantuan Layanan Sementara kepada Masyarakat, karena pelaksanaan program ini pada implementasinya masih ditemukan beberapa permasalahan-permasalahan dilapangan disaat dilakukannya pembagian dana BLSM dibeberapa daerah.

Masalah ini disebabkan:

- a. Data yang digunakan sebagian m,asih data yang lama, atau pendataan penduduk miskin menggunakan data pada saat BLT diluncurkan oleh pemerintah, padahal sudah banyak warga yang pada saat itu masih tergolong warga masyarakat miskin dan menerima BLT, saat ini sudah termasuk warga masyarakat tidak miskin lagi;

- b. Adanya warga masyarakat miskin pada saat peogram BLT digulirkan saat ini sudah meninggal, sehingga data tidak akurat.
  - c. Terdapat warga masyarakat yang mampu, tercatat dan masuk kategori warga masyarakat miskin dan mendapatkan bantuan BLSM.
  - d. Masih terdapat warga masyarakat miskin yang seharusnya menerima tidak dimasukan sebagai warga masyarakat yang layak mendapatkan bantuan BLSM.
2. Perlu sinergitas kerja Badan Pusat Statistik (BPS) yang dalam ini dipercaya untuk melakukan sensus penduduk, dengan Kementerian Dalam Negeri yang memiliki jajaran aparatur daerah ditingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, kelurahan serta desa. Kita ketahui bahwa yang memiliki aparatur sampai tingkatan desa dan kelurahan adalah Kementerian Dalam Negeri dimana Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarat dan DirektoratJenderal Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan organisasi pemerintah yang yang mempunyai tanggungjawab untuk menangani permasalahan penduduk di desa dan dikota-kota. Serta di Daerah memiliki Instansi dibawahnya sebagai yang menangani permasalahan kependuidukan didesa-desa dan diperkotaan.
  3. Perlu persamaan persepsi tentang kelurga miskin, rumah tangga miskin dari seluruh jajaran yang ditugasi untuk sensus penduduk baik pihak BPS, Jajaran Kementerian Dalam Negeri yang memiliki jajaran aparatur didesa-desa dan dikota-kota. Sehingga diperlukan standar baku yang jelas yang dijadikan dasar untuk menentukan seseorang dikatorikan masuk kedalam kelompok warga miskin dan termasuk rumah tangga miskin. Sehingga tidak menimbulkan multi tafsir di jajaran masyarakat serta aparatur pemerintah dan pemerintah daerah yang ditugasi untuk pendataan warga masyarakat miskin.
  4. Perlu dilakukan akurasi data secara konsisten dan berkala, sehingga data yang diperoleh pada saat pendataan sangat akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.  
Simpulan saran ini peneliti tulis merupakan pengalaman pada saat penulis menjadi pembimbing praktek lapangan paraja IPDN di Kabupaten Bantul. Dimana Praja IPDN dimintakan bantuan oleh Pak Camat dan Kepala Desa untuk membantu membagikan BLSM tahap pertama, penulis sebagai dosen pembimbing menggerakkan praja untuk membantu di kantor pos-kantor pos yang menjadi tempat penyaluran BLSM.
  5. Diperlukan pengawasan yang ketat pada implementasi dilapangan yang dimulai dari aspek pencairan pendanaan kegiatan dari masing program dan kegiatan yang dicanangkan sampai kepada distribusi penyaluran dana serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran , tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan oleh aparat pengawasan Internal pemerintah maupun eksternal pemerintah, dan masyarakat dikuatirkan sasaran capaiannya tidak tepat sasaaran sehingga program ini dikuatirkan akan gagal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Tjahya Supriyatna. " Strategi Pembangunan dan Kemiskinan " Penerbit Rineka Cipta Jakarta tahun, 2000.
- Selanjutnya faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan menurut Harry Hikmat dalam Muhamad Hafar Hafsah (2008 : 32)

WJS Poerwadarminta tahun 2001, kemiskinan diartikan sebagai keadaan tidak berharta benda, serba kurang. ( Dalam kamus Bahasa Indonesia ).

DR. Emil Salim, dalam Jusman (1999:27) mengemukakan lima ciri mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, Tahun 1982,

Harry Hikmat dalam Mohamad Jafar Hafsah” Faktor internal dan eksternal tersebut mengakibatkan kondisi fakir miskin tidak mampu” (1998 : 33 : 34)

Cornelis Rintuh, dan Miar. “ Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat ( BPFE- Jogyakarta 2005.

Hendra Asmara, “ mengukur dari ketimpangan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku. (1986).

Jusuf Suit, Almasdi, Yudefri Yusuf, “ Pemberdayaan Potensi Ekonomi Pedesaan Dalam Pembangunan Nasional “ IPB. Press, 2012.

Kemiskinan di Indonesia (fenomena dan fakta) Sarul Mardianto ( Sarul.com) Universitas Syiah kuala.